

Agile Governance Dalam Transformasi Tata Kelola Digital Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Adaptif Di Kabupaten Jember

Agile Governance in Digital Governance Transformation to Realize Adaptive Public Services in Jember Regency

Eka Novelita Putri¹, Siti Nur Setiana², Akbar Maulana³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jember
^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan

e-mail: ¹ekanolita35@gmail.com, ²sitinursetiana054@gmail.com
³akbar.maulana@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Agile Governance dalam transformasi tata kelola digital di Kabupaten Jember sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang adaptif dan responsif. Di tengah percepatan era Society 5.0, pemerintah daerah dituntut untuk mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika lingkungan digital. Agile Governance menawarkan pendekatan tata kelola yang fleksibel, iteratif, dan berorientasi pada hasil melalui digitalisasi proses birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Jember telah menginisiasi berbagai program transformasi digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi sistem informasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya koordinasi antar-perangkat daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan ekosistem digital terpadu, pengembangan kapasitas aparatur, serta adopsi prinsip-prinsip agile dalam desain layanan publik sebagai strategi menuju pelayanan publik yang adaptif di Kabupaten Jember.

Kata Kunci: Agile Governance, Transformasi Digital, Pelayanan Publik, Kabupaten Jember, Tata Kelola Digital

ABSTRACT

This study examines the implementation of Agile Governance principles in digital governance transformation in Jember Regency as an effort to realize adaptive and responsive public services. Amid the acceleration of the Society 5.0 era, local governments are required to adapt quickly to changing community needs and the dynamics of the digital environment. Agile Governance offers a flexible, iterative, and results-oriented governance approach through digitalization of bureaucratic processes. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques of literature study and policy document analysis. The results show that Jember Regency has initiated various digital transformation programs, but their implementation still faces challenges in the form of information system fragmentation, limited human resource capacity, and suboptimal coordination between regional apparatus. This study recommends strengthening the integrated digital ecosystem, developing apparatus capacity, and adopting agile principles in public service design as a strategy towards adaptive public services in Jember Regency.

Keywords: Agile Governance, Digital Transformation, Public Services, Jember Regency, Digital Governance

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi keniscayaan di era Society 5.0 yang menuntut integrasi antara teknologi informasi dan komunikasi dengan proses birokrasi secara menyeluruh. Pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan publik dihadapkan pada tekanan untuk terus berinovasi dan beradaptasi guna memenuhi ekspektasi masyarakat yang terus berkembang. Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah dengan kompleksitas demografis dan geografis yang tinggi di Provinsi Jawa Timur tidak luput dari tuntutan transformasi ini.

Konsep Agile Governance hadir sebagai respons atas keterbatasan model birokrasi tradisional yang cenderung rigid, lambat, dan berorientasi pada prosedur daripada hasil. Agile Governance menekankan fleksibilitas, kecepatan respons, kolaborasi lintas sektor, serta adaptabilitas terhadap perubahan sebagai prinsip utama tata kelola modern. Prinsip-prinsip ini selaras dengan kebutuhan pemerintah daerah yang harus mampu melayani masyarakat secara efektif di tengah dinamika lingkungan yang terus berubah.

Setyawan (2025) mencatat bahwa Kabupaten Jember telah menginisiasi berbagai program transformasi digital sebagai bagian dari strategi tata kelola pemerintahan daerah menuju era 5.0. Namun demikian, implementasi transformasi digital tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fragmentasi sistem informasi, rendahnya interoperabilitas antar sistem, hingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital semata tidak cukup tanpa didukung oleh kerangka tata kelola yang adaptif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Agile Governance dapat diintegrasikan dalam transformasi tata kelola digital di Kabupaten Jember guna mewujudkan pelayanan publik yang adaptif. Melalui kajian komprehensif terhadap literatur dan praktik tata kelola digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan dan implementasi transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Agile Governance

Agile Governance merupakan pendekatan tata kelola yang mengadaptasi prinsip-prinsip metodologi agile dari dunia pengembangan perangkat lunak ke dalam konteks administrasi publik. Kurniawan et al. (2021) mendefinisikan Agile Governance sebagai kemampuan organisasi untuk merespons secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Suryani dan Diniawaty (2024) menjelaskan bahwa agile governance pada dasarnya merupakan wujud nyata dari upaya penyederhanaan birokrasi yang memungkinkan pemerintah untuk bergerak lebih cepat, lebih responsif, dan lebih efisien dalam melayani publik. Pendekatan ini menolak model birokrasi hirarkis yang kaku dan menggantinya dengan struktur yang lebih datar, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Mukminin (2024) dalam kajiannya terhadap Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya Cettar (Sibekisar) di Provinsi Jawa Timur mengidentifikasi empat prinsip utama agile governance, yaitu: (1) kecepatan dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, (2) kolaborasi antar pemangku kepentingan, (3) orientasi pada nilai dan dampak, serta (4) kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Keempat prinsip ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang sistem tata kelola yang mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Maulana et al. (2022) yang menegaskan bahwa mindset agile mencakup tujuh aspek kunci: inovasi, manajer, otonom dan berjejaring, koordinasi terstruktur, transparansi, komunikasi terbuka, dan egaliter, sebagai prasyarat utama keberhasilan penerapan Agile Governance di organisasi publik.

Prihatini et al. (2025) menambahkan bahwa penerapan agile governance tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan daerah, tetapi juga relevan dalam konteks perguruan tinggi dan institusi publik lainnya. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa lingkungan sosial organisasi yang responsif dan terbuka terhadap perubahan merupakan prasyarat keberhasilan implementasi agile governance. Temuan ini mengisyaratkan bahwa transformasi budaya organisasi merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari transformasi struktural dan teknologis.

2. Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi digital pemerintahan merupakan proses fundamental yang mengubah cara pemerintah beroperasi, berinteraksi dengan warga, dan memberikan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital secara komprehensif. Robbiyani et al. (2022) menekankan pentingnya tata kelola teknologi informasi sebagai fondasi yang menentukan keberhasilan transformasi digital. Tata kelola TI yang baik mencakup aspek kepemimpinan, struktur organisasi, proses bisnis, serta mekanisme pengambilan keputusan berbasis data.

Suhermawan et al. (2023) melanjutkan bahwa pengaruh tata kelola TI terhadap transformasi digital bersifat signifikan dan multidimensi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa kementerian yang memiliki tata kelola TI yang matang cenderung mencapai tingkat transformasi digital yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berkorelasi positif dengan kinerja organisasi secara keseluruhan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya investasi dalam kapasitas tata kelola TI sebagai prasyarat transformasi digital yang berkelanjutan.

Rahmadany (2024) secara spesifik mengkaji transformasi digital pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen mewujudkan agile government dalam konteks reformasi birokrasi 4.0. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja aparatur menuju praktik yang lebih akuntabel dan berbasis kinerja. Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital dan agile governance merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

3. Agile Governance dalam Pelayanan Publik

Penerapan agile governance dalam konteks pelayanan publik telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam literatur administrasi publik. Kurniawan et al. (2021) membuktikan melalui studi di Kabupaten Banyuwangi bahwa Agile Governance yang diterapkan dengan baik, terstruktur, dan kolaboratif mampu mendorong transformasi inovasi pemerintah daerah secara berkelanjutan, bahkan dalam situasi peralihan kepemimpinan. Yanto et al. (2025) menganalisis implementasi agile governance pada program A'kio Smart City di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan menemukan bahwa pendekatan ini berhasil meningkatkan responsivitas pelayanan publik secara signifikan. Keberhasilan tersebut ditopang oleh integrasi teknologi digital dengan reformasi proses bisnis yang berorientasi pada kepuasan warga.

Rasaili et al. (2024) memberikan perspektif yang menarik tentang penerapan agile governance di tingkat pemerintahan desa melalui kajian inovasi desa mandiri. Penelitian mereka menunjukkan bahwa integrasi prinsip agile governance dengan pembangunan berkelanjutan di tingkat pedesaan dapat mendorong kemandirian dan kapasitas inovasi komunitas. Temuan ini relevan bagi Kabupaten Jember yang memiliki jumlah desa yang cukup besar dan tersebar di wilayah yang beragam secara geografis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena penerapan Agile Governance dalam transformasi tata kelola digital di Kabupaten Jember secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali kompleksitas dan kontekstualitas fenomena yang dikaji tanpa terbatas pada pengukuran kuantitatif semata.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, mencakup jurnal akademik, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan Agile Governance, transformasi digital pemerintahan, dan pelayanan publik. Analisis dokumen difokuskan pada regulasi, peraturan daerah, dan rencana strategis terkait transformasi digital di Kabupaten Jember.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, serta konsistensi dalam penerapan kerangka teoretis Agile Governance sebagai perspektif analisis utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Transformasi Digital di Kabupaten Jember

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, Kabupaten Jember telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam menginisiasi transformasi digital pemerintahan. Setyawan (2025) mendokumentasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah mengembangkan berbagai platform digital dalam rangka meningkatkan efisiensi tata kelola dan kualitas pelayanan publik. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan, digitalisasi layanan administrasi kependudukan, serta implementasi sistem keuangan berbasis teknologi informasi.

Namun demikian, kajian menunjukkan bahwa transformasi digital di Kabupaten Jember masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang signifikan. Pertama, fragmentasi sistem informasi yang dibangun secara parsial oleh masing-masing perangkat daerah mengakibatkan rendahnya interoperabilitas dan duplikasi data. Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi menjadi hambatan dalam operasionalisasi dan pengembangan sistem yang telah dibangun. Ketiga, koordinasi antar-perangkat daerah dalam implementasi program transformasi digital masih belum optimal.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Robbiyani et al. (2022) yang menekankan bahwa tata kelola TI yang matang merupakan prasyarat keberhasilan transformasi digital. Fragmentasi sistem dan lemahnya koordinasi mencerminkan belum matangnya tata kelola TI di Kabupaten Jember, yang pada gilirannya menghambat pencapaian target transformasi digital yang komprehensif.

2. Analisis Penerapan Prinsip Agile Governance

Analisis terhadap kondisi tata kelola digital di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Agile Governance masih berada pada tahap awal. Mengacu pada kerangka yang dikembangkan oleh Mukminin (2024), evaluasi terhadap empat dimensi Agile Governance menghasilkan gambaran sebagai berikut.

Pertama, dari dimensi kecepatan dan fleksibilitas pengambilan keputusan, Kabupaten Jember telah menunjukkan kemajuan melalui implementasi e-government yang memungkinkan proses birokrasi dilakukan secara lebih cepat. Namun, struktur hierarki yang masih dominan dalam pengambilan keputusan menjadi pembatas bagi respons yang cepat terhadap kebutuhan pelayanan yang berkembang. Penyederhanaan birokrasi sebagaimana dikaji oleh Suryani dan Diniawaty (2024) menjadi langkah strategis yang perlu dipercepat.

Kedua, dimensi kolaborasi antar pemangku kepentingan menunjukkan bahwa inisiatif transformasi digital di Kabupaten Jember masih bersifat sektoral. Integrasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam ekosistem digital belum terwujud secara optimal. Rasaili et al. (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi multi-aktor merupakan kunci keberhasilan Agile Governance, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah dengan karakteristik heterogen.

Ketiga, orientasi pada nilai dan dampak yang menjadi ciri khas Agile Governance menuntut pergeseran paradigma dari budaya birokrasi yang berorientasi prosedur menuju budaya yang berorientasi hasil. Prihatini et al. (2025) menekankan bahwa transformasi budaya organisasi merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi Agile Governance. Kabupaten Jember perlu mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang mengukur dampak nyata layanan digital terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keempat, kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang menjadi inti dari Agile Governance memerlukan mekanisme pembelajaran organisasi yang sistematis. Yanto et al. (2025) mendemonstrasikan dalam kasus A'kio Smart City di Kabupaten Gowa bahwa keberhasilan Agile Governance bergantung pada kapasitas organisasi untuk belajar dari pengalaman dan melakukan penyesuaian secara iteratif.

3. Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Adaptif

Berdasarkan analisis terhadap kondisi dan tantangan transformasi digital di Kabupaten Jember, penelitian ini merumuskan beberapa strategi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang adaptif melalui implementasi Agile Governance.

Strategi pertama adalah pembangunan ekosistem digital terpadu yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi perangkat daerah dalam sebuah platform yang interoperable. Suhermawan et al. (2023)

menegaskan bahwa tata kelola TI yang komprehensif merupakan tulang punggung transformasi digital yang berkelanjutan. Platform terpadu ini perlu dirancang dengan mengadopsi arsitektur yang fleksibel dan dapat dikembangkan secara iteratif sesuai kebutuhan.

Strategi kedua adalah pengembangan kapasitas aparatur secara berkelanjutan. Rahmadany (2024) mencatat bahwa keberhasilan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kompetensi aparatur dalam memanfaatkan sistem digital. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi digital perlu dirancang secara sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap perangkat daerah.

Strategi ketiga adalah adopsi metodologi agile dalam desain dan pengembangan layanan publik digital. Pendekatan ini mencakup pengembangan layanan secara iteratif berdasarkan umpan balik pengguna, pengujian prototipe layanan sebelum implementasi skala penuh, serta evaluasi berkelanjutan terhadap dampak layanan. Mukminin (2024) memberikan bukti empiris bahwa pendekatan ini efektif dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Lebih jauh, Maulana et al. (2022) menegaskan bahwa integrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam kerangka Agile Governance menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan berbasis elektronik, sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.

Strategi keempat adalah penguatan kerangka regulasi yang mendukung inovasi dan eksperimentasi dalam tata kelola digital. Suryani dan Diniawaty (2024) menunjukkan bahwa penyederhanaan regulasi merupakan enabler penting bagi agile governance. Kabupaten Jember perlu mengembangkan regulasi yang memberikan ruang bagi inovasi sambil tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi.

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Agile Governance dalam transformasi tata kelola digital di Kabupaten Jember merupakan langkah strategis yang perlu dipercepat untuk mewujudkan pelayanan publik yang adaptif dan responsif. Analisis menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Jember telah menginisiasi berbagai program transformasi digital, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan berupa fragmentasi sistem, keterbatasan kapasitas SDM, dan belum optimalnya koordinasi antar-perangkat daerah.

Agile Governance menawarkan kerangka tata kelola yang relevan dan aplikatif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui penekanan pada fleksibilitas, kolaborasi, orientasi hasil, dan kemampuan adaptasi. Empat strategi utama yang direkomendasikan mencakup pembangunan ekosistem digital terpadu, pengembangan kapasitas aparatur, adopsi metodologi agile dalam desain layanan, serta penguatan kerangka regulasi yang mendukung inovasi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi strategi-strategi tersebut secara empiris melalui penelitian lapangan yang melibatkan aparatur, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, pengembangan indikator kinerja yang spesifik untuk mengukur kemajuan implementasi Agile Governance di pemerintah daerah juga menjadi agenda penelitian yang penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukminin, M. A. (2024). Analisis Sibekisar (Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya Cettar) Dalam Mewujudkan Prinsip Agile Governance Di Provinsi Jawa Timur. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 2(1), 149–162.
- Prihatini, E. N., Mayarni, M., As'ari, H., Zulkarnaini, Z., & Desiarti, E. (2025). Telaah Respon Lingkungan Sosial Kampus Terhadap Agile Governance dan Zona Integritas di Perguruan Tinggi: An Examination of the Response of the Campus Social Environment to Agile Governance and Integrity Zones in Universities. *Anterior Jurnal*, 24(3), 52–60.
- Rahmadany, A. F. (2024). Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan agile government pada reformasi birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 195–209.
- Rasaili, W., Suharyanto, D. F., Andiriyanto, A., Saa, N., & Puspaningrum, I. I. (2024). Independent Village Innovation: Integration of Agile Governance and Sustainable Development in Rural Governance. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 45–60.
- Robbiyani, N., Mulyana, R., & Abdurrahman, L. (2022). Pengujian Model Pengaruh Tata Kelola TI Terhadap Transformasi Digital dan Kinerja Asuransi C. *Explore: Jurnal Sistem Informasi Dan Telematika*, 13(2), 95.
- Setyawan, A. (2025). Transformasi Digital Berbasis Data di Kabupaten Jember: Strategi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menuju Era 5.0. *Interelasi Humaniora*, 1(4), 396–402.
- Suhermawan, S. F. N., Mulyana, R., & Ramadani, L. (2023). Analisis Pengaruh Tata Kelola TI Terhadap Transformasi Digital Dan Kinerja Kementerian A. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 8(2), 370–380.
- Suryani, E., & Diniawaty, S. A. (2024). Penyederhanaan birokrasi: Wujud nyata langkah pemerintah Indonesia menuju agile governance. *Jurnal Publik*, 18(01), 11–25.
- Yanto, E., Anirwan, A., & Sirajuddin, S. M. (2025). Agile Governance pada A'kio Smart City dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Gowa. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(1), 11–19.
- Kurniawan, D. I., Maulana, A., & Wicaksono, I. (2021). Agile Governance Sebagai Bentuk Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah. *Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Maulana, A., Wicaksono, I., & Kurniawan, D. I. (2022). Acceleration of Artificial Intelligence Innovation in Banyuwangi Regency Government Using an Agile Governance Approach. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 209, 520–526. *Proceedings of the International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)*.